



PEMERINTAHAN

Raih Kinerja Tinggi dari Kemendagri

YOGYAKARTA, *Joglo*
Jogja - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama sembilan kota lain di Indonesia. Penghargaan ini merupakan hasil dari evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) tahun 2024.

Pemkot meraih penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,5166 poin dari penilaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta, pemerintah daerah tidak berhenti melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Terlebih, Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Tantangan otonomi daerah hari ini adalah tantangan memajukan sumber daya manusia dan membangun sistem meritokrasi di semua tingkatan dalam unsur pemerintah daerah. Sentralisasi dan desentralisasi bukan soal kewenangan pembagian kekuasaan. Tapi persoalan sinkronisasi dan sinergi untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat," kata Bima, akhir pekan lalu.



DOK KOMINFOSAN YOGYAJOGLO JOGJA

Wawan Harmawan

Wakil Wali Kota Yogyakarta

■ Baca RAIH... Hal II

Raih Kinerja Tinggi dari Kemendagri

sambungan dari hal Joglo Jogja

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengungkapkan, raihan ini menjadi penyemangat pihaknya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik dari transparansi maupun profesionalitas.

"Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang optimal. Begitu juga dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat," kata Wawan.

Ia menegaskan, penghargaan itu adalah hasil kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta dan

masyarakat. Raihan ini menjadi indikator pelayanan prima kepada masyarakat.

"Kami berharap pada tahun depan LPPD Kota Yogyakarta bisa jauh lebih baik lagi daripada capaian saat ini," ujar Wawan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta Subarjilan menjelaskan, EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dan perubahan capaian kinerja dalam LPPD.

Sedangkan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pe-

merintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD. Untuk pemerintah kabupaten/kota ada 126 indikator yang harus diisi datanya.

"Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan. Untuk Kota Yogya contoh urusan yang sebagian besar sudah tinggi capaiannya ada di urusan pendidikan, kesehatan, sosial. Indikator urusan pendidikan yang tinggi capaiannya antara lain partisipasi warga dalam PAUD, pendidikan dasar dan menengah pertama," terang (eri/amd/ul)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005